

**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
**TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan. Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan

informatika Kabupaten Pamekasan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si.**

NIP. 19680630 199303 1005

Pembina Utama Muda

## **PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 28 Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si.**

NIP. 19680630 199303 1005

Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja</b> .....	2
<b>C. Isu Strategis Perangkat Daerah</b> .....	4
<b>D. Landasan Hukum</b> .....	5
<b>E. Sistematika</b> .....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
<b>A. Rencana Strategis</b> .....	7
<b>B. Rencana Kinerja Tahun 2024</b> .....	13
<b>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b> .....	13
<b>BAB III</b> .....	19
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
<b>A. Pengukuran Kinerja</b> .....	21
<b>B. Analisis Capaian Kinerja</b> .....	22
<b>C. Realisasi Anggaran</b> .....	27
<b>D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b> .....	30
<b>E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan</b> .....	35
<b>BAB IV</b> .....	43
<b>PENUTUP</b> .....	43
<b>Lampiran</b> .....	45
<b>SK Tim SAKIP</b> .....	46
<b>SK Penetapan Dokumen IKU</b> .....	51
<b>PK Kepala Dinas dan Perubahannya Tahun 2024</b> .....	59
<b>Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024</b> .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerinthanan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

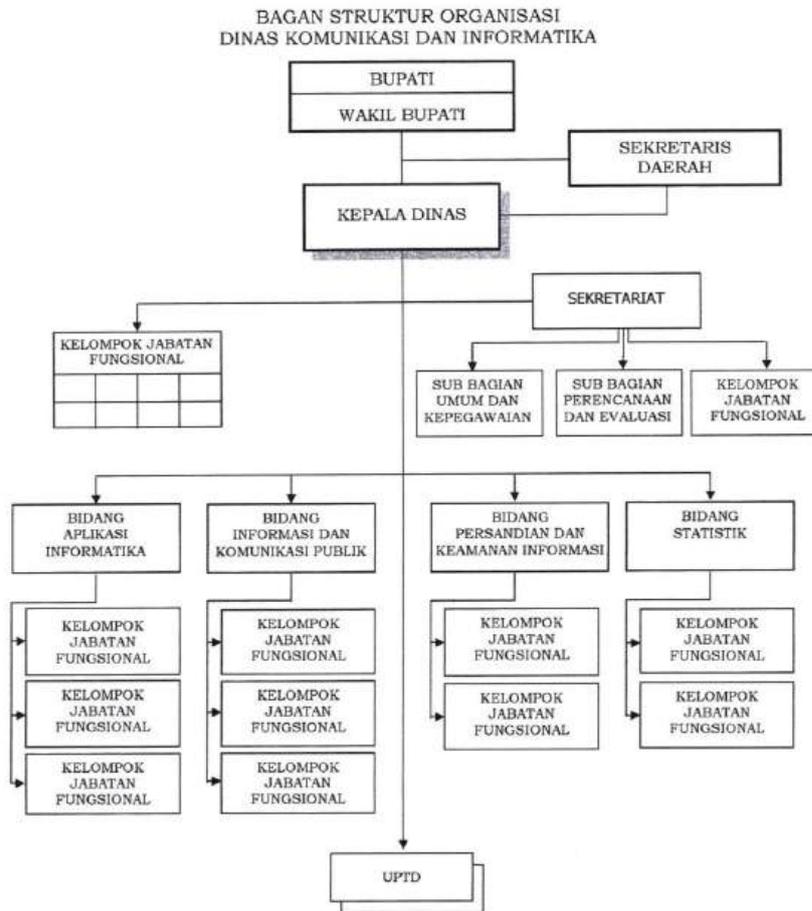
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis komunikasi dan informatika;
- Pembinaan dan pemeliharaan pengelolaan pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Pusat Data Nasional;
2. Satu Data Indonesia;
3. Keamanan Informasi;
4. Pengelolaan Isu Publik perihal program prioritas daerah

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

- i. Pusat Data Nasional
- ii. Satu Data Indonesia
- iii. Keamanan Informasi
- iv. Pengelolaan Isu Publik perihal program prioritas daerah

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN<br>Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.        |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA<br>Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja           |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA<br>Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran |
| BAB IV  | PENUTUP  |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks pelayanan publik (IPP)	3,86	4	4,5	4,85	4,85
		1.1	Meningkatnya kematangan domain SPBE	2,89	2,5	2,5	2,5	2,5
		1.2	Meningkatnya integrasi data statistik	2,14	2	2	2,1	2,1

*Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2024-2026*

## **2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya kematangan domain SPBE	1.1.	Indeks SPBE	nilai		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.</li> <li>• Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Hasil yang didapatkan dari penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah yang kemudian disebut sebagai indeks SPBE.</li> <li>• Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;</li> <li>b. aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan</li> <li>c. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai, dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator.</li> </ol> </li> </ul>	Menpan RB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• BDi adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I.</li> </ul>		
2	Meningkatnya integrasi data statistik	2.1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.</li> <li>• Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistic dijabarkan sebagai berikut:</li> </ul>	Badan Pusat Statistik	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K adalah Banyaknya domain penilaian;</li> <li>• Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;</li> <li>• Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;</li> </ul>	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**

### **Rencana Kinerja Tahun 2024**

#### **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks pelayanan publik (IPP)	nilai	4
		1.1 Meningkatkan kematangan domain SPBE	Indeks SPBE	nilai	2,5
		1.2 Meningkatkan integrasi data statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	nilai	2

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2024

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 mengalami 2 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Maret dan bulan Oktober 2024 dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET AWAL
1	2	3		4
1	Meningkatnya kematangan domain SPBE	1.1	Indeks SPBE	2,5
2	Meningkatnya integrasi data statistik	2.1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024*

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp 10.668.589.867 yang digunakan untuk melaksanakan 5 (Lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
<b>02.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>	<b>82</b>	<b>4.509.399.867</b>
<b>02.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</b>	<b>6</b>	<b>134.500.000</b>
02.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	90.000.000
02.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.000.000
02.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.000.000
02.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.000.000
02.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.000.000
02.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	22.500.000
02.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.000.000
<b>02.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>1</b>	<b>2.581.733.466</b>
02.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	2.581.733.466
<b>02.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>10</b>	<b>50.000.000</b>
02.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	50.000.000
<b>02.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>1</b>	<b>104.597.242</b>
02.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	2.500.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
02.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	13.700.600
02.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	10.000.000
02.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	4	5.896.642
02.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	70.000.000
02.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	2.500.000
<b>02.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah prasarana yang layak fungsi</b>	<b>2</b>	<b>204.710.258</b>
02.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	4	204.710.258
<b>02.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>5</b>	<b>1.228.858.901</b>
02.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	138.008.901
02.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.090.850.000
<b>02.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>11</b>	<b>205.000.000</b>
02.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	50.000.000
02.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	20.000.000
02.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	10.000.000
02.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	125.000.000
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>100</b>	<b>2.040.870.000</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</b>	<b>70</b>	<b>2.040.870.000</b>
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	5.000.000
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2	5.000.000
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	200.500.000
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	58.200.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	1.772.170.000
2.16.03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>60</b>	<b>3.805.000.000</b>
		<b>Domain Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>3</b>	
		<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>3</b>	
		<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>3</b>	
		<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	<b>100</b>	<b>3.215.000.000</b>
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	15.000.000
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	3.200.000.000
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>590.000.000</b>
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	525.000.000
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	25.000.000
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12	15.000.000
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	15.000.000
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	10.000.000
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>100</b>	<b>174.820.000</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</b>	<b>20</b>	<b>174.820.000</b>
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	40.000.000
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	42	22.200.000
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1	40.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	850	72.620.000
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi</b>	<b>1</b>	<b>138.500.000</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</b>	<b>3</b>	<b>78.500.000</b>
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	10.000.000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1	50.000.000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	42	18.500.000
<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</b>	<b>10</b>	<b>60.000.000</b>
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4	60.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

## A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 146% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran 1 Meningkatkan kematangan domain SPBE						
1.1	Indeks SPBE	2,5	3,92	157%	Sangat Baik	LHE Menpan
Sasaran 2 Meningkatkan integrasi data statistik						
2.1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2	2,7	135%	Sangat Baik	LHE BPS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kematangan domain SPBE

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya kematangan domain SPBE” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian indikator sasaran kematangan domain SPBE Tahun 2024**

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks SPBE	2,5	3,92	157%
Formulasi perhitungan	$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li><li>• BDi adalah nilai bobot domain ke-i;</li><li>• NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li><li>• BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-l.</li></ul>		

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa

mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

**Tabel 3.4**  
**Nilai Indeks SPBE Tahun 2022 s.d 2024**

<b>Indikator</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Indeks SPBE	2,10	2,89	3,92

Terjadi Peningkatan realisasi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, hal ini didukung oleh :

1. Tingkat kematangan rencana dan anggaran serta inovasi proses bisnis dan peta rencana Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan rata-rata tingkat kematangan level 4
2. Beberapa kekuatan dalam penerapan tata kelola aspek teknologi informasi dan komunikasi seperti Tingkat kematangan pusat layanan data, Layanan jaringan Intra, dan penggunaan sistem penghubung Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah diterapkan dengan rata-rata tingkat kematangan level 5
3. Sudah terlihat kekuatan dalam penerapan tata kelola aspek penyelenggaraan SPBE yaitu Kolaborasi penerapan SPBE dan tim koordinasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah diterapkan secara penuh baik untuk Tim Koordinator maupun Kolaborasi Penerapan SPBE.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan provinsi dan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Provinsi dan Standar Nasional**

<b>Indikator</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Nasional</b>
Indeks SPBE	3,92	4,4 *)	3,12 *)

*\*) Data dari kemenpanRB*

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Indeks SPBE Kabupaten Pamekasan lebih rendah dari capaian Provinsi dan lebih tinggi dari capaian Indeks SPBE Nasional.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Pamekasan adalah pada Kebijakan Internal Tata penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek TIK, aspek penyelenggara SPBE, dan Aspek Layanan Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Tata Kelola melalui Peraturan Perbup Pamekasan no 57 tahun 2019, arsitektur SPBE, Peta rencana telah mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data dengan adanya SOP Layanan Hosting dan Penempatan Data, Jaringan Intra yang dapat diakses oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang memberikan layanan pemerintahan sesuai topologi yang disampaikan, dan Sistem Penghubung Layanan yang mengatur interoperabilitas berbagai layanan perizinan. Begitu pula pada Aspek Penyelenggaraan SPBE dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan dan kearsipan melalui Srikandi sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh

keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten pamekasan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

**Sasaran Strategis 2**  
Meningkatnya integrasi data statistik

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya integrasi data statistik” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian sasaran integrasi data statistik Tahun 2024**

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2	2,7	135%
Formulasi perhitungan	$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● K adalah Banyaknya domain penilaian;</li> <li>● Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;</li> <li>● Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;</li> </ul>		

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Tahun 2022 s.d 2024**

<b>Indikator</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	-	2,14	2,7

Terjadi Peningkatan realisasi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, dimana pada Tahun 2022 Indeks Pembangunan Statistik Sektoral masih berada di tahap uji coba. Pada tahun 2024 hasil penilaian Indeks Pembangunan statistik sektoral sebesar 2,72 dimana melampaui nilai harapan yang terdapat pada laporan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian dengan Provinsi**

<b>Indikator</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Provinsi</b>	<b>% Capaian</b>
Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,7	3,08 *)	127%

*\*) Data dari Badan Pusat Statistik*

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Kabupaten Pamekasan lebih tinggi dari capaian Provinsi dengan persentase capaian sebesar 127%.

Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah mencapai predikat cukup. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur terkait tata kelola data di Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang mencakup antara lain metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk. Penerapan aspek metadata statistik, interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten.

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>02.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.509.399.867</b>	<b>4.237.545.640</b>	<b>93.97%</b>
<b>02.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>134.500.000</b>	<b>118.774.069</b>	<b>88.31%</b>
02.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	84.630.550	94.03%
02.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	2.989.950	99.67%
02.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	2.994.900	99.83%
02.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.989.900	99.66%
02.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	2.990.000	99.67%
02.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.500.000	22.178.769	98.57%
02.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	-	0%
<b>02.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.581.733.466</b>	<b>2.543.648.981</b>	<b>98.52%</b>
02.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.581.733.466	2.543.648.981	98.52%
<b>02.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>35.140.000</b>	<b>70.28%</b>
02.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	35.140.000	70.28%
<b>02.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>104.597.242</b>	<b>83.186.191</b>	<b>79.53%</b>
02.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.445.000	97.8%
02.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.700.600	11.731.500	85.63%
02.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	4.267.000	42.67%
02.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.896.642	5.784.500	98.1%
02.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	58.323.191	83.32%
02.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	635.000	25.4%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>02.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>204.710.258</b>	<b>48.250.000</b>	<b>23.57%</b>
02.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.710.258	48.250.000	23.57%
<b>02.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.228.858.901</b>	<b>1.211.760.055</b>	<b>98.61%</b>
02.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.008.901	128.060.055	92.79%
02.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.850.000	1.083.700.000	99.34%
<b>02.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>205.000.000</b>	<b>196.786.344</b>	<b>95.99%</b>
02.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	45.581.800	91.16%
02.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	16.749.300	83.75%
02.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.623.729	96.24%
02.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	124.831.515	99.87%
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2.040.870.000</b>	<b>1.972.494.741</b>	<b>96.65%</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.040.870.000</b>	<b>1.972.494.741</b>	<b>96.65%</b>
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.000.000	5.000.000	100%
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.000.000	5.000.000	100%
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	200.500.000	194.121.398	96.82%
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	58.200.000	57.705.000	99.15%
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.772.170.000	1.710.668.343	96.53%
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>3.805.000.000</b>	<b>3.314.693.584</b>	<b>87.11%</b>
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.215.000.000</b>	<b>3.195.392.000</b>	<b>99.39%</b>
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.703.000	98.02%
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.200.000.000	3.180.689.000	99.4%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>590.000.000</b>	<b>119.301.584</b>	<b>20.22%</b>
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000	73.821.390	14.06%
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	25.000.000	15.356.500	61.43%
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	15.000.000	13.963.500	93.09%
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	15.000.000	14.029.694	93.53%
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	<b>10.000.000</b>	2.130.500	21.31%
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>174.820.000</b>	<b>170.374.675</b>	<b>97.46%</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>174.820.000</b>	<b>170.374.675</b>	<b>97.46%</b>
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<b>40.000.000</b>	39.560.375	98.9%
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	22.200.000	20.635.000	92.95%
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	40.000.000	39.734.700	99.34%
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	72.620.000	70.444.600	97%
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>138.500.000</b>	<b>49.327.600</b>	<b>35.62%</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>78.500.000</b>	<b>32.367.700</b>	<b>41.23%</b>
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.808.300	98.08%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000	14.051.400	28.1%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.500.000	8.508.000	45.99%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	<b>16.959.900</b>	<b>28.27%</b>
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	16.959.900	28.27%

#### D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya kematangan domain SPBE	2,5	3,92	157%	3.805.000.000	3.314.693.584	87%	0,70
2	Meningkatnya integrasi data statistik	2	2,72	136%	174.820.000	170.374.675	97%	0,39

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran kematangan domain SPBE diperoleh nilai efisiensi positif sebesar 0,70 dan untuk sasaran integrasi data statistik juga diperoleh nilai efisiensi positif sebesar 0,39 yang berarti bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program / kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
<b>02.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>82</b>	<b>80,5</b>	<b>98,17%</b>	<b>4.509.399.867</b>	<b>4.237.545.640</b>	<b>93,97%</b>	<b>0,04</b>
<b>02.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>134.500.000</b>	<b>118.774.069</b>	<b>88,31%</b>	<b>0,12</b>
02.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	90.000.000	84.630.550	94,03%	0,06
02.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	3.000.000	2.989.950	99,67%	0,00
02.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	3.000.000	2.994.900	99,83%	0,00
02.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	3.000.000	2.989.900	99,66%	0,00
02.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	1	100%	3.000.000	2.990.000	99,67%	0,00
02.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100%	22.500.000	22.178.769	98,57%	0,01
02.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100%	10.000.000	-	0%	1,00
<b>02.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>2.581.733.466</b>	<b>2.543.648.981</b>	<b>98,52%</b>	<b>0,01</b>
02.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22	20	95,45%	2.581.733.466	2.543.648.981	98,52%	-0,03
<b>02.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>35.140.000</b>	<b>70,28%</b>	<b>0,00</b>
02.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	7	70%	50.000.000	35.140.000	70,28%	0,00
<b>02.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>104.597.242</b>	<b>83.186.191</b>	<b>79,53%</b>	<b>0,20</b>
02.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	3	100%	2.500.000	2.445.000	97,80%	0,02
02.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	25	100%	13.700.600	11.731.500	85,63%	0,14
02.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	100%	10.000.000	4.267.000	42,67%	0,57
02.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	4	100%	5.896.642	5.784.500	98,10%	0,02

No.	Program / kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
02.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	13	27,08%	70.000.000	58.323.191	83,32%	-0,56
02.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	100%	2.500.000	635.000	25,40%	0,75
<b>02.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>204.710.258</b>	<b>48.250.000</b>	<b>23,57%</b>	<b>0,76</b>
02.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	24	600%	204.710.258	48.250.000	23,57%	5,76
<b>02.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>1.228.858.901</b>	<b>1.211.760.055</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,01</b>
02.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	138.008.901	128.060.055	92,79%	0,07
02.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	1.090.850.000	1.083.700.000	99,34%	0,01
<b>02.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>163,64%</b>	<b>205.000.000</b>	<b>196.786.344</b>	<b>95,99%</b>	<b>0,68</b>
02.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	100%	50.000.000	45.581.800	91,16%	0,09
02.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	3	100%	20.000.000	16.749.300	83,75%	0,16
02.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	9	225%	10.000.000	9.623.729	96,24%	1,29
02.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	100%	125.000.000	124.831.515	99,87%	0,00
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>2.040.870.000</b>	<b>1.972.494.741</b>	<b>96,65%</b>	<b>0,03</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>107,14%</b>	<b>2.040.870.000</b>	<b>1.972.494.741</b>	<b>96,65%</b>	<b>0,10</b>
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	1	100%	5.000.000	5.000.000	100%	0,00
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2	2	100%	5.000.000	5.000.000	100%	0,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	3	100%	200.500.000	194.121.398	96,82%	0,03
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	1	1	100%	58.200.000	57.705.000	99,15%	0,01
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5	5	100%	1.772.170.000	1.710.668.343	96,53%	0,03
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>166,67%</b>	<b>3.805.000.000</b>	<b>3.314.693.584</b>	<b>87,11%</b>	<b>0,80</b>

No.	Program / kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
		3	5	166,67%				1,67
		3	4,4	146,67%				1,47
		3	3	100%				1,00
		3	3,68	122,67%				1,23
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>3.215.000.000</b>	<b>3.195.392.000</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,01</b>
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	15.000.000	14.703.000	98,02%	0,02
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	1	100%	3.200.000.000	3.180.689.000	99,40%	0,01
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>590.000.000</b>	<b>119.301.584</b>	<b>20,22%</b>	<b>0,80</b>
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	2	66,67%	525.000.000	73.821.390	14,06%	0,53
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1	1	100%	25.000.000	15.356.500	61,43%	0,39
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	12	12	100%	15.000.000	13.963.500	93,09%	0,07
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	3	100%	15.000.000	14.029.694	93,53%	0,06
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	1	100%	10.000.000	2.130.500	21,31%	0,79
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>174.820.000</b>	<b>170.374.675</b>	<b>97,46%</b>	<b>0,03</b>
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>70%</b>	<b>174.820.000</b>	<b>170.374.675</b>	<b>97,46%</b>	<b>-0,27</b>
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	4	100%	40.000.000	39.560.375	98,90%	0,01

No.	Program / kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
2.20.02.2.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	42	42	100%	22.200.000	20.635.000	92,95%	0,07
2.20.02.2.0 1.0005	Pengembangan Infrastruktur	1	1	100%	40.000.000	39.734.700	99,34%	0,01
2.20.02.2.0 1.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	850	634	74,59%	72.620.000	70.444.600	97%	-0,22
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>138.500.000</b>	<b>49.327.600</b>	<b>35,62%</b>	<b>-0,36</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3</b>	<b>5,26</b>	<b>175,33%</b>	<b>78.500.000</b>	<b>32.367.700</b>	<b>41,23%</b>	<b>1,34</b>
2.21.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	2	66,67%	10.000.000	9.808.300	98,08%	-0,31
2.21.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	100%	50.000.000	14.051.400	28,10%	0,72
2.21.02.2.0 1.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42	33	78,57%	18.500.000	8.508.000	45,99%	0,33
<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1000%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>16.959.900</b>	<b>28,27%</b>	<b>9,72</b>
2.21.02.2.0 2.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	42	1050%	60.000.000	16.959.900	28,27%	10,22

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran rata-rata bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

## E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.12**

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Meningkatnya kematangan domain SPBE	Indeks SPBE	3,92	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>	98.17%	Menunjang
	Meningkatnya integrasi data statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,7	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu</b>	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					Perubahan DPA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95.45%	Menunjang
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	70%	Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70%	Menunjang
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.08%	Menunjang
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Menunjang
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah prasarana yang layak fungsi</b>	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	600%	Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</b>	163.64 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang
				<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	100%	Menunjang
				<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</b>	107.14 %	Menunjang
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100%	Menunjang
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100%	Menunjang
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100%	Menunjang
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100%	Menunjang
				<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	166.67 %	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					<b>Domain Kebijakan Internal SPBE</b>	166.67 %	Menunjang
					<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	146.67 %	Menunjang
					<b>Domain Manajemen SPBE</b>	100%	Menunjang
					<b>Domain Layanan SPBE</b>	122.67 %	Menunjang
				<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	100%	Menunjang
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</b>	100%	Menunjang
				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.67%	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	100%	Menunjang
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	100%	Menunjang
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</b>	100%	Menunjang
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS</b>	70%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	Menunjang
				Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	74.59%	Menunjang
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi</b>	0%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</b>	175.33 %	Menunjang
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	66.67%	Menunjang
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	100%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	78.57%	Menunjang
				<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</b>	1000%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1050%	Menunjang

Dari tabel diatas, bahwa indikator sasaran strategis ditunjang oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian rata-rata 79,57 persen dengan kriteria tinggi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil” Karena realisasi 2 dari 2 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas dengan rincian:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.668.589.867 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.744.436.240 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 91,34% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 52,7%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si.**

NIP. 19680630 199303 1005

Pembina Utama Muda

# **Lampiran**

## **SK Tim SAKIP**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jokotole IV/1 Telp. (0324) 322868/Fax : (0324) 3510199

Website : [kominfo.pamekasankab.go.id](http://kominfo.pamekasankab.go.id) email : [diskominfo@pamekasankab.go.id](mailto:diskominfo@pamekasankab.go.id)

PAMEKASAN

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR 188/66/432.314/2024**

**TENTANG  
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan maka perlu dilakukan rencana aksi dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
  - b. Menyusun dan/atau mereview Rencana Strategis (Renstra);
  - c. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - d. Menyusun Perjanjian Kinerja;
  - e. Menghimpun Data Kinerja;
  - f. Menyusun Pengukuran Kinerja;
  - g. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

- KETIGA : i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan;  
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. HIDAJATUL FIRDAUS, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710707 199101 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan  
 Nomor : 188/66/432.314/2024  
 Tanggal : 15 Januari 2024  
 Tentang : Tim Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORTMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3. 4.	Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika 3. Kepala Bidang Statistik 4. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Ditetapkan di : Pamekasan  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. HIDAJATUL FIRDAUS, M.SI**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710707 199101 1 003

## **SK Penetapan Dokumen IKU**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/71.1/432.314/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 No.10); Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang
7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;  
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang
8. penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023, tentang
9. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Menetapkan :**

**Pertama**

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

- Kedua** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator Utama, dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
: 11 Desember 2023

---

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pamekasan



Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710707 199101 1 003

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
Tujuan	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
Tugas	: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum komunikasi dan informatika; c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis komunikasi dan informatika; e. Pembinaan dan pemeliharaan pengelolaan pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika; f. Penilaian kinerja bawahan; g. Pelaksanaan administrasi dinas; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik (IPP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)</li> <li>• Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.</li> <li>• Adapun bobot dari masing-masing aspek sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Kebijakan pelayanan 30%</li> <li>2. Aspek Profesionalisme SDM 18%</li> <li>3. Aspek Sarana Prasarana 15%</li> <li>4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik 15%</li> <li>5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan 15%</li> <li>6. Aspek Inovasi 7%</li> </ol> </li> </ul>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya kematangan domain SPBE	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.</li> <li>• Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Hasil yang didapatkan dari penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah yang kemudian disebut sebagai indeks SPBE.</li> <li>• Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas:</li> </ul>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bidang Aplikasi Informatika

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<p>a. domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;  b. aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan  c. indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai, dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator.</p> $\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• BDi adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I.</li> </ul>		
Meningkatnya integrasi data statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.</li> <li>• Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan</li> </ul>	Badan Pusat Statistik	Bidang Statistik

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<p>nilai indeks pembangunan statistic dijabarkan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K adalah Banyaknya domain penilaian;</li> <li>• Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;</li> <li>• Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;</li> </ul>		

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pamekasan



Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710707 199101 1 003

# **PK Kepala Dinas dan Perubahannya Tahun 2024**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S. Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamekasan, Januari 2024

Pihak Kesatu,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	1	Indeks SPBE	2,5
2	Meningkatkan Integrasi Data Statistik	2	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,0

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.654.477.195	APBD
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 1.960.000.000	APBD
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 3.530.000.000	APBD
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 259.620.000	APBD
	Rp. 155.000.000	APBD

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, Januari 2024

Pihak Kesatu,

Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si  
NIP. 19710707 199101 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S. Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 29 Maret 2024

Pihak Kesatu,

Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	1.1	Indeks SPBE	2,5
		1.2	Indeks Pembangunan Statistik Sektor	2,0

Program	Anggaran	Keterangan
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.654.477.195	APBDP
7. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
8. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 1.960.000.000	APBDP
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 3.530.000.000	APBDP
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 259.620.000	APBDP
	Rp. 155.000.000	APBDP

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 29 Maret 2024

Pihak Kesatu,



Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si  
NIP. 19710707 199101 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TAUFIKURRACHMAN M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S. Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

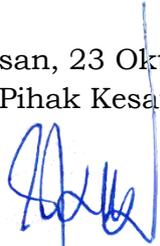
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 23 Oktober 2024

Pihak Kesatu,

  
Drs. Taufikurrachman M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	1	Indeks SPBE	2,5
2	Meningkatnya Integrasi Data Statistik	2	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,0

Program	Anggaran	Keterangan
11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.509.399.867	APBDP
12. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
13. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 2.040.870.000	APBDP
14. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 3.805.000.000	APBDP
15. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 174.820.000	APBDP
	Rp. 138.500.000	APBDP

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 23 Oktober 2024

Pihak Kesatu,

  
Drs. Taufikurrachman, M.Si  
NIP. 19680630 199303 1 005

# **Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab		Keterangan	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		17	18	
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																													
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Skala	82	13.106.185.073,00	82,5	-	82	4.509.399.867,00	0	642.835.967,00	0	1.354.788.993,00	0	962.685.689,00	80,5	1.277.234.991,00	80,5	4.237.545.640,00	98,17%	93,97%	163	4.237.545.640,00	198,78%	32,33%	-			
02.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	6	366.649.500,00	6	-	6	134.500.000,00	2	10.809.769,00	1	9.390.000,00	2	33.304.000,00	1	65.270.300,00	6	118.774.069,00	100%	88,31%	12	118.774.069,00	200%	32,39%	-			
02.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	236.600.000,00	3	-	3	90.000.000,00	1	2.584.000,00	1	6.660.000,00	1	33.304.000,00	0	42.082.550,00	3	84.630.550,00	100%	94,03%	6	84.630.550,00	200%	35,77%	-			
02.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	11.500.000,00	3	-	1	3.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	2.989.950,00	1	2.989.950,00	100%	99,67%	4	2.989.950,00	400%	26%	-			



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan					
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			17
		an Dokumen Perubahan DPA-SKPD																										
02.16.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	60.000.000,00	1	-	2	22.500.000,00	0	8.225.769,00	1	2.730.000,00	0	-	1	11.223.000,00	2	22.178.769,00	100%	98.57%	3	22.178.769,00	150%	36.96%	-		
02.16.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	30.000.000,00	2	-	4	10.000.000,00	0	-	0	-	2	-	2	-	4	-	100%	0%	6	-	150%	0%	-		
02.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan	OPD	1	7.384.856.167,00	1	-	1	2.581.733.466,00	1	307.492.888,00	0	993.850.883,00	0	548.659.563,00	0	693.645.647,00	1	2.543.648.981,00	100%	98.52%	2	2.543.648.981,00	200%	34.44%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18
02.16.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	7.311.029.109,00	21	-	22	2.581.733.466,00	20	307.492.888,00	20	993.850,00	21	548.659.563,00	21	693.645.647,00	21	2.543.648.981,00	95,45%	98,52%	42	2.543.648.981,00	19,09%	34,79%	-		
02.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Orang	10	142.131.500,00	10	-	10	50.000.000,00	0	-	1	9.020.000,00	3	20.800.000,00	3	5.320.000,00	7	35.140.000,00	70%	70,28%	17	35.140.000,00	17,00%	24,72%	-		
02.16.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	130.000.000,00	10	-	10	50.000.000,00	0	-	1	9.020.000,00	3	20.800.000,00	3	5.320.000,00	7	35.140.000,00	70%	70,28%	17	35.140.000,00	17,00%	27,03%	-		
02.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kantor	1	199.225.000,00	1	-	1	104.597.242,00	1	-	0	22.376.134,00	0	14.511.608,00	0	46.298.449,00	1	83.186.191,00	10,00%	79,53%	2	83.186.191,00	20,00%	41,75%	-		
02.16.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe	Paket	3	13.000.000,00	0	-	3	2.500.000,00	0	-	0	-	0	-	3	2.445.000,00	3	2.445.000,00	10,00%	97,8%	3	2.445.000,00	10,00%	18,81%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab		Keterangan	
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18	
	gan Bangunan Kantor	nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																											
02.16.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	15.000.000,00	21	-	25	13.700.600,00	0	-	0	-	0	300.000,00	25	11.431.500,00	25	11.731.500,00	100%	85.63%	46	11.731.500,00	184%	78.21%	-			
02.16.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	18.000.000,00	0	-	3	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	3	4.267.000,00	3	4.267.000,00	100%	42.67%	3	4.267.000,00	100%	23.71%	-			
02.16.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	12.000.000,00	0	-	4	5.896.642,00	0	-	0	675.000,00	2	1.000.000,00	2	4.109.500,00	4	5.784.500,00	100%	98.1%	4	5.784.500,00	100%	48.2%	-			
02.16.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	48	135.000.000,00	0	-	48	70.000.000,00	0	-	1	21.701.134,00	8	13.211.608,00	4	23.410.449,00	13	58.323.191,00	27.08%	83.32%	13	58.323.191,00	27.08%	43.2%	-			

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		Keterangan	
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%	14 = 12 + 6	15 = 14 / 5 x 100%	16	17	18												
		Konsultasi SKPD																											
02.16.01.2.06.00.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	8.650.000,00	4	-	4	2.500.000,00	0	-	0	-	0	-	4	635.000,00	4	635.000,00	100%	25.4%	8	635.000,00	200%	7.34%	-			
02.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Unit	2	641.666.490,00	5	-	2	204.710.258,00	0	-	0	-	0	46.300.000,00	2	1.950.000,00	2	48.250.000,00	100%	23.57%	7	48.250.000,00	350%	7.52%	-			
02.16.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	46.400.150,00	11	-	4	204.710.258,00	0	-	0	-	2	46.300.000,00	2	1.950.000,00	2	48.250.000,00	600%	23.57%	35	48.250.000,00	875%	10.399%	-		keuangan belum terealisasi semua	
02.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Jasa	5	4.067.293.216,00	10	-	5	1.228.858.901,00	5	318.283.310,00	0	294.280.176,00	0	286.436.218,00	0	312.760.351,00	5	1.211.760.055,00	100%	98.61%	15	1.211.760.055,00	300%	29.79%	-			
02.16.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Laporan	12	367.226.013,00	0	-	12	138.008.901,00	3	28.633.310,00	3	27.880.176,00	3	31.036.218,00	3	40.510.351,00	12	128.060.055,00	100%	92.79%	12	128.060.055,00	100%	34.87%	-			

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												k
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18	
		si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																											
02.16.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.661.596.000,00	12	-	12	1.090.850.000,00	3	289.650.000,00	3	266.400.000,00	3	255.400.000,00	3	272.250.000,00	12	1.083.700.000,00	100%	99.34%	24	1.083.700.000,00	200%	29.6%	-			
02.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit	11	304.363.200,00	0	-	11	205.000.000,00	1	6.250.000,00	2	25.871.800,00	5	12.674.300,00	10	151.990.244,00	18	196.786.344,00	163.64%	95.99%	18	196.786.344,00	163.64%	64.66%	-			
02.16.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	152.400.000,00	2	-	3	50.000.000,00	1	6.250.000,00	1	15.691.800,00	1	7.978.000,00	0	15.662.000,00	3	45.581.800,00	100%	91.16%	5	45.581.800,00	166.67%	29.91%	-			

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan							
				5	6	7	8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%								14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%			
							k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k								Rp	k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		17	18		
02.16.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	15.300.000,00	3	-	3	20.000.000,00	0	-	0	4.480.000,00	1	2.696.300,00	2	9.573.000,00	3	16.749.300,00	10	0%	83.75%	6	16.749.300,00	20	10	9.47%	-		
02.16.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	10.180.000,00	0	-	4	10.000.000,00	0	-	0	5.700.000,00	3	2.000.000,00	6	1.923.729,00	9	9.623.729,00	22	5%	96.24%	9	9.623.729,00	22	54	94.5%	-		
02.16.01.2.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	125.000.000,00	1	-	2	125.000.000,00	0	-	0	-	0	-	2	124.831.515,00	2	124.831.515,00	10	0%	99.87%	3	124.831.515,00	0%	99.87%	-			
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	%	100	1.800.000.000,00	80,22	-	100	2.040.870.000,00	25	-	25	486.280.000,00	25	514.680.794,00	25	971.533.947,00	100	1.972.494.741,00	10	0%	96.65%	180,22	1.972.494.741,00	180,22	10	9.58%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		Keterangan	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	17
		informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota																											
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	80	1.800.000,00	42,0168	-	70	2.040.870,00	33	-	18,5	486.280,00	17	514.680,79	6,5	971.533,947,00	75	1.972.494,741,00	10,714%	96,65%	117,0168	1.972.494,741,00	14,627%	10,958%	-			
2.16.02.2.01.00.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan	Dokumen	1	55.000,00	0	-	1	5.000,00	0	-	0	-	0	1.000,00	1	4.000,00	1	5.000,00	100%	100%	1	5.000,00	100%	9,9%	-			

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16		F. Pendorong	F. Penghambat
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	17	18
		Aspirasi Publik																											
2.16.02.2.01.00.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2	55.000.000,00	0	-	2	5.000.000,00	0	-	0	-	1	500.000,00	1	4.500.000,00	2	5.000.000,00	100%	100%	2	5.000.000,00	100%	90%	-			
2.16.02.2.01.00.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	350.000.000,00	3	-	3	200.500.000,00	0	-	2	89.920.000,00	0	18.000.000,00	1	86.201.398,00	3	194.121.398,00	100%	96.82%	6	194.121.398,00	100%	55%	-			
2.16.02.2.01.00.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	190.000.000,00	1	-	1	58.200.000,00	0	-	0	9.020.000,00	1	12.020.000,00	0	36.665.000,00	1	57.705.000,00	100%	99.15%	2	57.705.000,00	100%	30%	-			
2.16.02.2.01.00.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	5	1.050.000.000,00	5	-	5	1.772.170.000,00	0	-	3	387.340.000,00	0	483.160.794,00	2	840.167.549,00	5	1.710.668.343,00	100%	96.53%	10	1.710.668.343,00	100%	16%	-			

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		Keterangan	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		F. Pendorong	F. Penghambat
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16		17	18
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	8.983.939.500,00	60	0	60	0	14.569.196,00	849.765.700,00	815.922.500,00	1.634.436.188,00	100	0	3.314.693.584,00	166.67%	160	3.314.693.584,00	266.67%	160	36.9%	-	Perangkat Daerah menggunakan aplikasi umum yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam memberikan layanan publik	Belum dilakukan pendataan layanan publik secara lengkap dan terinci ke semua Perangkat Daerah				
		Domaian Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3		1,8	3	0	0		0	5	5	5		166.67%	6,8		226.67%				-	Pada aspek kebijakan internal, semua indikator sudah sangat kuat atau menjadi kekuatan dalam penerapan aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Tidak ada kelemahan terkait kebijakan internal Tata Kelola SPBE, hanya perlu dipertahankan.				





No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan								
				5	6	7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%								14 = 12 + 6	15 = 14 / 5 x 100%					
1	2	3	4	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	F. Pendorong	F. Penghambat					
				17	18																										
		Domain Manajemen SPBE	Nilai	3		1		3		0		0		0		3		3		10		4		13		3.3		3%	<p>Pada aspek penerapan manajemen SPBE yang terlihat yang menjadi kekuatannya ada pada Penerapan Manajemen Keamanan informasi dan Penerapan manajemen Data</p> <p>1. Kabupaten pamekasan masih bisa meningkatkan walaupun dirasa sudah cukup yaitu pada manajemen resiko</p> <p>2. Kabupaten Pamekasan masih perlu ditingkatkan dalam semua aspek pelaksanaan Audit TIK baik itu audit infrastruktur, aplikasi maupun keamanan karena belum dilakukan audit oleh eksternal audit dan belum adanya reviu terhadap ketiga aspek audit tersebut.</p>		
		Domain Layanan SPBE	Nilai	3		2,8		7		3		0		0		0		3		12		6,5		21		8.3		3%	<p>1. Layanan perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan barang dan jasa, Kepegawaian, Kearsipan,</p> <p>1. Perlu adanya perbaikan pemerintah kabupaten Pamekasan pada layanan administrasi SPBE terkhusus pada</p>		



No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab		Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16		F. Pendorong	F. Penghambat
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	17	18
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	8.361.503.500,00	100	-	100	3.215.000.000,00	100	-	0	804.664.500,00	0	799.340,00	0	1.591.387.500,00	100	3.195.392.000,00	100%	99.39%	200	3.195.392.000,00	200%	38.22%	-			
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	71.180.000,00	1	-	1	15.000.000,00	0	-	0	9.664.500,00	1	3.750.000,00	0	1.288.500,00	1	14.703.000,00	100%	98.02%	2	14.703.000,00	200%	20.66%	-	1. Setiap OPD telah memiliki website 2. Telah dilakukann pelatihan terkait manajemen Website pada operator OPD	1. Kemampuan server Diskominfo tidak memadai untuk memfasilitasi OPD 2. Keaktifan OPD dalam melakukan pembaharuan pada website yang dikelola sangat minim 3. Kurangnya perhatian Kepala OPD dalam memberikan atensi terkait pentingnya peranan Website Dinas	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp											
5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18				
2.16.03.2.01.00.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jaringan	1	8.100.000.000,00	1	-	1	3.200.000.000,00	1	-	0	795.000,00	0	795.900,00	0	1.590.099,00	1	3.180.689,00	10	99.4%	2	3.180.689,00	20	39,27%	-	1. Tingkat kepuasan user pada OPD setiap tahun semakin meningkat 2. Penambahan perangkat secara bertahap untuk memaksimalkan layanan OPD 3. Komitmen Tim Teknis dalam penyelesaian berbagai kendala/gangguan yang ada	1. Tidak memiliki anggaran yang cukup terkait perawatan atau kerusakan perangkat apabila terjadi kerusakan perangkat pada titik layanan 2. Minimnya fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Bidang Aptika
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	622.436.000,00	0	-	100	590.000,00	100	14.569.196,00	0	45.101.200,00	0	16.582.500,00	0	43.048.688,00	100	119.301.584,00	10	20.22%	100	119.301.584,00	10	19,17%	-		
2.16.03.2.02.00.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam	Dokumen	3	425.000.000,00	1	-	3	525.000,00	0	14.569.196,00	0	45.101.200,00	2	339.000,00	0	13.811.994,00	2	73.821.390,00	66,67%	14.06%	3	73.821.390,00	10	17,37%	-	1. Mendapat Anggaran PAK 2025 2. Menyusun Dokumen Arsitektur SPBE 3. Tersedianya Dokumen Assessment Mandiri SPBE	1. Tidak mendapat Anggaran Penyusunan Dokumen Peta Rencana 2. Waktu pengerjaan Dokumen yang sangat sempit

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan						
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp	k	Rp	k
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		17	18	
	Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																											(dikarenakan Sumber Dana dari P-APBD)
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Dokumen	0	25.000.000,00	0	-	1	25.000.000,00	0	-	0	-	1	6.476.500,00	0	8.880.000,00	1	15.356.500,00	100%	61.43%	1	15.356.500,00	0%	61.43%	-	1. Telah disusunnya Dokumen Masterplan Smart City 2. Telah dilakukan desk terkait pemilihan Quickwin pada setiap Dimensi	1. Kurang fokusnya atensi Dewan Smart City dalam mengembangkan Smart City di Pamekasan 2. Banyaknya dimensi dalam pengembangan Smart City yang tidak terpenuhi 3. Anggaran yang sangat minim dalam mensupport kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Smart City	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan					
										I		II		III		IV												
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	17	18			
2.16.03.2.02.00.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi	12	70.000.000,00	12	-	12	15.000.000,00	12	-	0	-	0	5.194.500,00	0	8.769.000,00	12	13.963.500,00	100%	93.09%	24	13.963.500,00	200%	19.95%	-	1. Koordinasi yang baik antara Diskominfo dengan OPD pemilik Aplikasi 2. Adanya Peraturan Presiden yang melarang dibuatnya Aplikasi-aplikasi baru	1. Sulitnya prosedur untuk bisa melakukan integrasi antar Aplikasi 2. Tidak memiliki dokumentasi yang valid terkait jumlah aplikasi yang masih aktif dan aplikasi yang sudah terintegrasi 3. Tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pendataan dan screening ulang terhadap aplikasi yang berkembang di OPD
2.16.03.2.02.00.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Dokumen	3	70.000.000,00	0	-	3	15.000.000,00	0	-	0	-	2	2.442.000,00	1	11.587.694,00	3	14.029.694,00	100%	93.53%	3	14.029.694,00	100%	20.04%	-	1. Mendapatkan support dalam melaksanakan 3 kali pelatihan terkait Pengembangan SDM 2. Pelatihan yang telah dilakukan adalah Implementasi Srikandi,	1. Sedikitnya SDM bidang IT di Bidang Aptika 2. Minimnya Anggaran untuk pelatihan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan skill SDM yang ada.

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		Keterangan		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16		F. Pendorong	F. Penghambat	
1	2	3	4	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	17	18		
		Komunikasi Pemerintah Daerah																											Pelatihan terkait jaringan Fiber Optik, dan pelatihan terkait Penanganan serangan cyber	
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	55.000.000,00	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	2.130.500,00	1	-	1	2.130.500,00	100%	21.31%	1	2.130.500,00	100%	3.87%	-		Melakukan pelatihan atau pendampingan pada Kepala OPD hingga Bupati terkait penggunaan Aplikasi Srikandi	Kurangnya anggaran untuk dapat melaksanakan Pelatihan kepada Kepala OPD di tempat yang sesuai dan memadai bagi Pejabat Eselon I dan II	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	836.660.694,00	100	-	100	174.820.000,00	0	-	0	22.321.600,00	0	19.781.500,00	100	128.271.575,00	100	170.374.675,00	100%	97.46%	200	170.374.675,00	200%	20.36%	-				
2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi Produk Administrasi	60	836.660.694,00	4	-	20	174.820.000,00	0	-	0	22.321.600,00	0	19.781.500,00	104	128.271.575,00	104	170.374.675,00	70%	97.46%	18	170.374.675,00	30%	20.36%	-				

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18
2.20.02.2.01.00.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	4	160.000.000,00	4	-	4	40.000.000,00	0	-	1	20.590.000,00	2	13.976.500,00	1	4.993.875,00	4	39.560.375,00	100%	98.9%	8	39.560.375,00	200%	24.73%		-	
2.20.02.2.01.00.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	42	100.000.000,00	42	-	42	22.200.000,00	0	-	0	42	5.305.000,00	0	15.330.000,00	42	20.635.000,00	100%	92.95%	84	20.635.000,00	200%	20.64%	-			
2.20.02.2.01.00.05	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Infrastruktur	1	74.738.424,00	1	-	1	40.000.000,00	0	-	0	1	-	0	39.734.700,00	1	39.734.700,00	100%	99.34%	2	39.734.700,00	200%	53.17%	-			
2.20.02.2.01.00.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Data	850	418.000.000,00	0	-	850	72.620.000,00	0	-	0	1.731.600,00	0	500.000,00	634	68.213.000,00	634	70.444.600,00	74.59%	97%	634	70.444.600,00	74.59%	16.85%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab		Keterangan	
										I		II		III		IV													
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	17	18	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	3	307.149.500,00	0	-	1	138.500.000,00	0	-	0	3.259.500,00	0	13.644.450,00	0	32.423.650,00	0	49.327.600,00	0%	35.62%	0	49.327.600,00	0%	16.06%	-		Karena belum terlaksananya penilaian Indeks KAMI	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	10	231.249.500,00	1,82	-	3	78.500.000,00	5,26	-	0	3.259.500,00	0	7.093.550,00	0	22.014.650,00	5,26	32.367.700,00	17,533%	41.23%	7,08	32.367.700,00	70,8%	14%	-			

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan					
										I		II		III		IV												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%	14 = 12 + 6						15 = 14 / 5 x 100%	16	F. Pendorong	F. Penghambat		
k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	17	18					
2.21.02.2.01.00.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	70.000.000,00	0	-	3	10.000.000,00	1	-	0	1.510.500,00	1	2.669.100,00	0	5.628.700,00	2	9.808.300,00	66,67%	98,08%	2	9.808.300,00	66,67%	14,01%	-	Penyusunan kebijakan di bidang persandian dan keamanan informasi	
2.21.02.2.01.00.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Laporan	12	43.600.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	1.480.500,00	1	12.570.900,00	1	14.051.400,00	10,0%	28,1%	1	14.051.400,00	8,33%	32,23%	-	Penanganan insiden siber oleh Tim Pamekasankab -CSIRT dan Pengamanan sinyal pada kegiatan strategis tertentu	Tidak adanya kegiatan strategis tertentu yang memanfaatkan pengacak sinyal/jammer oleh Pemerintah Daerah dan masih sebatas memenuhi permintaan dari Pusat (bilamana ada kunjungan Presiden/Wakil Presiden)

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Keterangan					
										I		II		III		IV												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12 / 7 x 100%	14 = 12 + 6						15 = 14 / 5 x 100%	16	F. Pendorong	F. Penghambat		
k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	17	18					
2.21.02.2.01.00.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan akan Layanan Keamanan Informasi	Pera ngka t Daerah	42	115.000.000,00	1	-	42	18.500.000,00	0	-	8	1.749.000,00	14	2.943.950,00	11	3.815.050,00	33	8.508.000,00	78.57%	45.99%	34	8.508.000,00	80.95%	7.4%	-	Integrasi tanda tangan elektronik pada Aplikasi Srikandi	ASN di 9 OPD yang ASN belum melakukan aktivasi tanda tangan elektronik pada tahun ini karena kurangnya respon dari OPD terkait
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	20	75.900.000,00	1,91	-	10	60.000.000,00	100	-	0	-	0	6.550.900,00	0	10.409.000,00	100	16.959.900,00	100%	28.27%	101,91	16.959.900,00	509.55%	22.35%	-		

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Keterangan						
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 12 + 6		15 = 14 / 5 x 100%		16	F. Pendorong	F. Penghambat	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		17	18	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotora	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	8	70.600.000,00	0	-	4	60.000.000,00	4	-	0	-	0	6.550.900,00	0	10.409.000,00	4	16.959.900,00	10	50%	28.27%	42	16.959.900,00	52	24.02%	-	Penggunaan Email go.id sebagai email kedinasan dalam pengiriman berita antar OPD menyebabkan target terlaksana pola hubungan komunikasi sandi tercapai maksimal	Masih ada OPD yang belum terbiasa memanfaatkan email.go.id sebagai alat pengiriman dokumen kedinasan
<b>Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran</b>																			<b>13</b>	<b>2.24%</b>	<b>79.57%</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>									